

PEMANFAATAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN DAERAH

2020

PERDA KOTA MADIUN NO.1, LD 2020 / NO. 1 SERI D, TLD NO. 92, 33 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG PEMANFAATAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN DAERAH

ABSTRAK : Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undnag-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/ PRT/ M/ 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2015; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 48 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai maksud dan tujuan, bagian dan fungsi jalan, pemanfaatan bagian jalan, penggunaan bagian jalan, izin, rekomendasi, dan dispensasi, pengawasan, pemindahan dan pembongkaran, larangan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Mei 2020

- Penjelasan : 7 hlm.